



# EVALUASI RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**TRIWULAN II  
2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Juni 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  
Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Jantani Ali, ST**  
Nip. 19731022 200501 1 007

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

**DAFTAR ISI ..... Hal**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ..... 1

1.3. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja..... 2

1.4. Program dan Kegiatan ..... 9

**BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021 ..... 10**

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja  
dan Renstra ..... 10

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/  
Kegiatan Dalam Renja..... 15

**BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 16**

**BAB IV PENUTUP..... 17**

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2023 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II antara lain :

- a. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.

- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

### 1.3. Sasaran , Program, Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini

:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai Sakip</b>	<b>81</b>
	<b>Survey Kepuasan Payananan Internal</b>	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia (Doukumen)	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	36
Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	299
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD (Dokumen)	4
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	288
Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1020
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah barang daerah yang memadai	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	840
Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4
<b>PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>0</b>
Pengelolaan SDA dan	Persentase penurunan luas kawasan	6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi	
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi (Unit)	3
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya sungai (KM)	84
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola	13506
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)	3
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (KM)	19
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan (KM)	40
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (KM)	9000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM)	9
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang difungsikan (Unit)	4
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</b>	<b>100</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	4
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</b>	<b>0</b>
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun (Dokumen)	1
	Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (Penyelenggara)	1
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi	1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	yang Disusun (Dokumen)	
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)	1
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan</b>	<b>50</b>
	<b>Persentase rumah tangga yang besanitasi</b>	<b>6</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun (dokumen)	1
	Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah (KK)	560
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)	1
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (KK)	560
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat)	8
<b>PRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PEMGELOLAAN PERSAMPAHAN DRAINASE</b>	<b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan</b>	<b>100</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan kawasan Strategis Provinsi	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun (Dokumen)	2
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	2
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan</b>	<b>100</b>
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan (Unit)	17
	Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan (Dokumen)	1
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan (Dokumen)	3
Pemeliharaan dan Perawatan	Jumlah Bangunan Gedung untuk	2



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah	Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (Unit)	12
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)	2
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Unit)	8
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara (Dokumen)	4
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya (Ha)	42
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	3
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	27
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	28
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	160
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	4
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)</b>	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan	7

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
	peningkatan jalan (KM)	
	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan (KM)	4
	Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan (M)	42
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	8
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	4
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)	60
Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	30
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km)	3310
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (M)	13599
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan (Dokumen),	4
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi</b>	<b>71</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	83
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (orang)	780
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	65
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	120
Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	8
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>88</b>
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan	4
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	4
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	4
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4
<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>PRESENTASE Program PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	71
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	83
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	780
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	71
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	83
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	780
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>PRESENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	71
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	780
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	780
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	100
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	15
Identifikasi Perumahan di Lokasi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi	4

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	
Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	4
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	2
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan</b>	<b>100</b>
<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen, Laporan)	5
Penyusun/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Laporan)	4
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU</b>	<b>100</b>
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Dokumen)	8
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Laporan)	7
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk mEnunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	4
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UPTD)</b>	<b>SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD</b>	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan (%)	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan	100

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100
Pengadaan Meubel	Jumlah Jenis Meubel yang disediakan (Jenis)	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (%)	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100

#### 1.4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 18 Program, 33 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan.

## BAB II

### EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN II TAHUN 2023

#### 2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja**

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai Sakip</b>	<b>81</b>
	<b>Survey Kepuasan Payananan Internal</b>	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia (Doukumen)	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	36
Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	299
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD (Dokumen)	4
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	288
Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1020
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah barang daerah yang memadai	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	840
Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>0</b>
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi	6
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi (Unit)	3
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya sungai (KM)	84
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola	13506
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)	3
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (KM)	19
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan (KM)	40
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (KM)	9000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM)	9
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang difungsikan (Unit)	4
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</b>	<b>100</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	4
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PEMGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</b>	<b>0</b>
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun (Dokumen)	1
	Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam	1



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	5
	Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (Penyelenggara)	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)	1
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan</b>	<b>50</b>
	<b>Persentase rumah tangga yang besanitasi</b>	<b>6</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun (dokumen)	1
	Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah (KK)	560
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)	1
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (KK)	560
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat)	8
<b>PRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DRAINASE</b>	<b>Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan</b>	<b>100</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan kawasan Strategis Provinsi	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun (Dokumen)	2
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	2
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan</b>	<b>100</b>
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan (Unit)	17
	Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan (Dokumen)	1
Perencanaan, Pembangunan,	Jumlah Dokumen Perencanaan,	3

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan (Dokumen)	
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	2
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi (Unit)	12
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)	2
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Unit)	8
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara (Dokumen)	4
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya (Ha)	42
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	3
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	27
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	28
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	160
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan	4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
	Lingkungan	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)</b>	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan (KM)	7
	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan (KM)	4
	Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan (M)	42
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	8
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	4
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)	60
Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	30
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km)	3310
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (M)	13599
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan (Dokumen),	4
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi</b>	71
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	83
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (orang)	780
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	65
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	120
Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	8
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang</b>	88
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan	4

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	4
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	4
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	4
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4
<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>PRESENTASE Program PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	71
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	83
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	780
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	71
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	83
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	780
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>PRESENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	71
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	780
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	780
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	100

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	15
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	4
Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	4
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	2
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan</b>	<b>100</b>
<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen, Laporan)	5
Penyusun/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Laporan)	4
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU</b>	<b>100</b>
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Dokumen)	8
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Laporan)	7
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk mEnunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	4
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UPTD)</b>	<b>SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD</b>	
Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100
Penyediaan Barang Cetak dan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan	100

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)
3	4	K 5
Penggandaan	dan Penggandaan (%)	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan (%)	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100
Pengadaan Meubel	Jumlah Jenis Meubel yang disediakan (Jenis)	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (%)	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 18 Program, 35 Kegiatan dan 169 Sub Kegiatan dalam rencana strategis dan 18 Program, 33 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2023.

## 2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan/sub kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD Triwulan II Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 78.195.963.227 (26,72%)** dari pagu **Rp. 292.689.619.572**. Evaluasi terhadap hasil renja triwulan II dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

### **BAB III**

#### **KENDALA**

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya peralihan Bank untuk Kas Daerah dari Bank Sumsel Babel menjadi Bank Rakyat Indonesia. Akibat dari peralihan bank tersebut proses pencairan keuangan untuk beberapa paket kegiatan menjadi terhambat.
2. Belum terlaksananya penandatanganan kontrak paket kegiatan karena masih dalam tahap proses lelang.



## BAB IV

### PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 78.195.963.227 (26,72%)** dari pagu **Rp. 292.689.619.572**. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan II Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan pada tahun anggaran ini dan juga sebagai bahan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.